

***Collaborative Governance* dalam Menciptakan *Branding Kota* Surakarta Sebagai Kota Festival**

Robi Suwarna^{1*}

¹Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Abstract

Festival activities are carried out as part of tourism promotion to market Surakarta City so that it can compete with other cities in the world in attracting investment, attracting tourists, and so on. It is necessary to identify the urban development plans carried out by the City of Surakarta, describe the roles of various actors from various sectors in the successful implementation of festival activities in the City of Surakarta, and explain the governance shape used in the City of Surakarta. The method used is descriptive and explanatory research with a qualitative approach to describe the development plans for the City of Surakarta and describe the integrative framework in Collaborative Governance that occurs in organising festival activities. The result of this research is the development plan for Surakarta City is to carry out city branding as a Festival City with a specific theme, namely its culture and the success of its implementation is the result of the collaboration of various actors from various sectors with their respective roles which an integrative framework model for Collaborative Governance can describe. This study concluded that Collaborative Governance is a governance shape carried out in Surakarta's city development planning. Collaborative Governance is considered a very good thing that impacts the economic and social community and cultural preservation.

Keywords: *collaborative governance, culture, festival city*

Abstrak

Kegiatan festival dilaksanakan sebagai bagian dari promosi wisata untuk memasarkan Kota Surakarta agar dapat bersaing dengan kota lain di dunia dalam menarik investasi, menarik wisatawan, dan sebagainya. Diperlukan identifikasi terhadap rencana pembangunan kota yang dilakukan oleh Kota Surakarta dan perlu digambarkan peran berbagai aktor dari berbagai sektor dalam keberhasilan penyelenggaraan berbagai kegiatan festival di Kota Surakarta, serta perlu dijelaskan tata kelola yang dipakai di Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan eksplanatori dengan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan rencana pembangunan Kota Surakarta dan menggambarkan kerangka kerja integratif dalam Collaborative Governance yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan festival. Dari penelitian ini, diketahui bahwa rencana pembangunan Kota Surakarta yaitu melakukan city branding sebagai Kota Festival dengan kekhususan tema yaitu tentang budayanya serta kesuksesan penyelenggaraannya adalah hasil kolaborasi berbagai aktor dari berbagai sektor dengan perannya masing-masing yang dapat digambarkan dengan model kerangka kerja integratif untuk Collaborative Governance. Kesimpulannya, collaborative Governance merupakan tata kelola yang dilakukan di Kota Surakarta dalam perencanaan pembangunan kotanya. Collaborative Governance dianggap sangat baik untuk dilakukan. Sebagai buktinya, kegiatan festival di Kota Surakarta yang berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat, serta dalam pelestarian budaya.

Kata kunci: budaya, collaborative governance, kota festival

* robisuwarna@gmail.com

PENDAHULUAN

Kota Surakarta adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai hal unik yaitu mempunyai dua nama yaitu Surakarta dan Solo. Nama Surakarta digunakan dalam situasi formal-pemerintahan, sedangkan nama Solo lebih merujuk pada penyebutan umum yang dilatarbelakangi oleh aspek budaya. Sehingga untuk nama *website* resmi yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta memiliki kedua unsur nama dari Kota Surakarta tersebut, karena merupakan *website* resmi pemerintah yaitu untuk situasi formal-pemerintahan dan juga pembahasannya yaitu mengenai aspek budaya. *Website* tersebut diberi nama yaitu www.pariwisatasolo.surakarta.go.id.

Kota Surakarta dikenal sebagai salah satu pusat dari kebudayaan Jawa yaitu berbagai literatur berbahasa Jawa, tari, seni boga, busana, arsitektur, dan bermacam-macam ekspresi budaya lainnya. Terdapat beberapa budaya di Kota Surakarta yang telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia (Primasasti, 2022). Budaya tersebut diantaranya adalah batik, keris, wayang, dan gamelan.

Dari banyaknya budaya yang dimiliki oleh Kota Surakarta, beberapa

diantaranya adalah Kirab Malam Satu Suro Keraton Surakarta, Topeng Sekartaji, Tari Gambyong Pareanom, dan Tari Bondan (pariwisatasolo.surakarta.go.id).

Dengan banyaknya budaya yang dimiliki oleh Kota Surakarta, maka kehidupan sosial masyarakatnya tidak bisa terlepas dari budaya yang juga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yaitu dari nilai-nilai sosialnya. Adanya nilai budaya tersebut yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Kota Surakarta dapat menjadikannya potensi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan juga termasuk politik di Kota Surakarta.

Jenis taktik pemasaran berbasis tempat untuk mempromosikan diri sebagai tujuan wisata yang diinginkan juga dapat diterapkan dalam strategi pemasaran kota (Stolarick dkk., 2010). Sehingga dalam memanfaatkan kebudayaan yang dimiliki oleh Kota Surakarta, maka pemerintah Kota Surakarta melakukan perencanaan pembangunan kota tematik dengan membuat branding baru untuk Kota Surakarta sebagai Kota Festival. Berbagai kegiatan festival dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dengan berbagai macam tema, dengan tema utama yaitu adalah kegiatan festival

budaya. Namun seiring berjalannya waktu, maka kegiatan-kegiatan festival yang dilakukanpun mulai menambahkan tema kegiatan yang lebih modern, misalnya festival musik jazz dan lain sebagainya. Perencanaan pembangunan Kota Surakarta menggunakan perencanaan pembangunan kota tematik sebagai Kota Festival bertujuan untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan, budaya.

Beberapa teori lainnya mengenai *city branding*, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Kota-kota bersaing secara global untuk menarik pariwisata, investasi, dan bakat, serta untuk mencapai banyak tujuan lainnya, konsep strategi merek semakin banyak diadopsi dari dunia komersial dan diterapkan untuk mengejar pembangunan perkotaan, regenerasi, dan kualitas hidup (Dinnie, 2011); (2) Globalisasi mempengaruhi masyarakat perkotaan terhadap meningkatnya persaingan antar kota, yang memaksa kota untuk meningkatkan daya tariknya termasuk menggunakan *city branding* yang lebih menekankan pada mempromosikan daya tarik kota sebagai lokasi bisnis atau wisata dan persaingan antarkota global pada dasarnya adalah tentang kemampuan kota untuk menarik nilai setinggi mungkin dari aliran nilai global untuk mempromosikan pembangunan

lokal (Anttiroiko, 2014); (3) Operasi kota dalam konteks wilayah kota global yaitu setiap kota berharap dapat menarik investor, industri dengan nilai tambah tinggi, tenaga kerja berbakat, dan wisatawan serta mereka menggunakan strategi *city branding* untuk membuat profil mereka terhadap dunia (de Jong dkk., 2018); (4) *City branding* dapat mempromosikan atribut kota yang berwujud dan tidak berwujud untuk bersaing memperebutkan pasar konsumen dunia, turis, bisnis, investasi, pekerja terampil, dan pasar pemikiran serta dapat menggunakannya untuk menyatukan para pemangku kepentingan kota dengan identitas baru yang kompetitif dan untuk menyampaikan pesannya kepada target pasarnya (Gilboa dkk., 2015).

Sehingga, Kota Surakarta dengan *branding* baru sebagai kota festival diharapkan dapat bersaing dengan kota-kota lainnya di Indonesia, bahkan dengan kota-kota lainnya didunia.

City branding lebih dari sekedar promosi kota melalui komunikasi pemasaran tapi juga melibatkan kebijakan pembangunan kota sehingga melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk menentukan dan menerapkan konsep merek tempat yang akan digunakan (Zenker, 2018). *City branding* adalah bidang politik yang

kompleks yang melibatkan lebih dari sekadar institusi yang mengatur kota, yang menjual ide, strategi, dan rencana berorientasi pasar untuk mengembangkan citra yang menarik dalam persaingan pasar perkotaan atau merupakan strategi pertumbuhan di dunia global (Vanolo, 2018). Sehingga, dalam penerapannya konsep *city branding* membutuhkan berbagai kolaborasi dari pemerintah, swasta, aktor-aktor tokoh dimasyarakat, serta masyarakat itu sendiri agar *city branding* yang dilakukan yaitu sebagai Kota Festival dapat terlaksana dengan sukses.

Sedangkan berikut adalah beberapa teori mengenai festival, diantaranya adalah: (1) Menurut Smith dkk., (2022) Festival adalah ciri penting kota kontemporer yang dapat dipahami sebagai perayaan atau atraksi, dan juga sebagai agen perubahan perkotaan. Festival dapat menciptakan tontonan visual, tetapi juga *soundscape*s dan atmosfer yang berbeda. Festival lebih dipahami sebagai fenomena yang terkait dengan cara kerja kota, dengan ruang perkotaan dibangun kembali sebagai tempat perayaan, dan festival disesuaikan sebagai strategi perkotaan; (2) Dalam arti luas, festival adalah sesuatu yang tidak biasa, tempat yang khusus, tema yang terancang dan dapat diakses publik (Gold & Gold, 2020);

(3) Pertanyaan yang menarik untuk dipertimbangkan, kemudian, adalah bagaimana “ruang festival yang direncanakan secara strategis” tersebut dirancang, digunakan, dan dialami (Johansson, 2020); (4) Mungkin aspek terpenting dari sebuah festival yang membedakannya dari sekadar tontonan adalah aspek temporalitasnya sebagai sebuah peristiwa (Martínez Sánchez dkk., 2018); (5) Salah satu alasan meluasnya penggunaan festival sebagai stimulus pembangunan perkotaan adalah fleksibilitasnya, festival dapat dipandang sebagai alat kebijakan multifungsi (Richards & Leal Londoño, 2022).

Sehingga festival adalah *branding* yang sangat tepat untuk dilakukan oleh Kota Surakarta dengan segala potensi yang dimiliki oleh Kota Surakarta, dengan potensi utamanya yaitu beragam kebudayaan yang dimilikinya.

Keberhasilan Kota Surakarta dalam perencanaan pembangunan kota tematik sebagai kota festival melalui *city branding* ditentukan oleh keberhasilan terselenggaranya berbagai kegiatan festival yang dilakukan oleh Kota Surakarta. Keberhasilan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan festival itu akan sangat bergantung pada bukan hanya komitmen pemerintah saja, namun juga sangat bergantung kepada aktor-aktor lainnya

yaitu pihak swasta, *event* manajemen, sponsor, aktor-aktor tokoh di masyarakat, dan tentu saja masyarakat Kota Surakarta itu sendiri. Kolaborasi antar sektor ini, dijelaskan dengan teori tentang *Collaborative Governance*.

Beberapa teori mengenai *Collaborative Governance* diantaranya sebagai berikut: (1) Proses *Collaborative Governance* seperti meja bundar multiaktor proses penyelesaian masalah dan negosiasi kebijakan yang menyatukan berbagai aktor mulai dari pemerintah, bisnis, dan sektor nirlaba untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian bersama, sehingga *Collaborative Governance* yaitu merujuk pada proses dalam usaha berbagi kekuasaan dalam pengambilan keputusan dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan rekomendasi bersama untuk solusi yang efektif dan bertahan lama untuk permasalahan publik (Purdy, 2012); (2) *Collaborative Governance* secara luas adalah sebagai suatu proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang-orang secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau ruang publik, swasta dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai

dengan cara lain (Emerson dkk., 2012); (3) Tata kelola kolaboratif adalah jenis tata kelola di mana aktor publik dan swasta bekerja secara kolektif dengan cara yang berbeda, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum dan aturan untuk penyediaan barang publik (Ansell & Gash, 2008); (4) Tata kelola kolaboratif adalah fenomena kompleks yang melibatkan banyak bagian yang bergerak dalam hubungan dinamis dari waktu ke waktu, menghubungkan struktur kelembagaan yang berbeda, banyak pemimpin, pemangku kepentingan yang beragam, dan tantangan kebijakan substantif yang rumit (Ahn & Emerson, 2022).

Dari beberapa pengertian mengenai *Collaborative Governance* tersebut, maka pada penelitian ini akan menjelaskan gambaran mengenai *Collaborative Governance* yang terjadi di Kota Surakarta dalam menciptakan *branding* Kota Surakarta sebagai Kota Festival. *Collaborative Governance* tersebut juga akan dijelaskan sesuai dengan Kerangka kerja integratif untuk tata kelola kolaboratif berdasarkan (Emerson dkk., 2012). Penjelasan mengenai *Collaborative Governance* tersebut dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap rencana pembangunan kota yang dilakukan oleh Kota Surakarta yang kemudian

digambarkan peran berbagai aktor dari berbagai sektor dalam keberhasilan penyelenggaraan berbagai kegiatan festival di Kota Surakarta. Sehingga, penelitian ini dapat membantu kota-kota lainnya agar dapat mengikuti Kota Surakarta dalam melakukan *branding* menggunakan *collaborative governance*.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang dikombinasikan dengan penelitian eksplanatori untuk menjelaskan mengenai *Collaborative Governance* dalam menciptakan *branding* Kota Surakarta sebagai kota festival. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan gambaran suatu fenomena, keadaan atau kejadian dari suatu objek dengan menggunakan metode tertentu (Pirmanto dkk., 2016). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menghasilkan gambaran mengenai rencana pembangunan Kota Surakarta sebagai kota festival dan gambaran mengenai kegiatan festival yang dilaksanakan di Kota Surakarta, serta uraian kolaboratif yang diambil dari hasil analisis data penelitian sebelumnya yang penelitian tersebut menjelaskan mengenai kegiatan festival di Kota Surakarta secara umum. Sedangkan penelitian eksplanatori

adalah suatu penelitian dengan tujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis tentang hubungan sebab akibat, penelitian eksplanatori berguna untuk memperkuat atau mungkin menolak teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang sudah ada (Pirmanto dkk., 2016). Penelitian eksplanatori yang dilakukan adalah menjelaskan teori *collaborative governance* dalam menciptakan *branding* Kota Surakarta sebagai kota festival sehingga hasilnya dapat menyatakan teori *collaborative governance* tersebut relevan dilakukan dalam melaksanakan rencana pembangunan di Kota Surakarta.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tugas inti analisis kualitatif sebagai suatu proses yang melingkar yaitu menggambarkan karakteristik objek secara menyeluruh dan komprehensif, menghubungkan kategori-kategori tersebut menjadi sebuah konsep, dan mengelompokkan data menjadi kategori-kategori tertentu (Dey, 1993).



Gambar 1.
Tugas inti analisis kualitatif

Sumber: Dey, 1993

Pada penelitian ini akan dilakukan 3 analisis yaitu sebagai berikut.

Pertama, analisis rencana pembangunan Kota Festival melalui dokumen rencana pembangunan daerah Kota Surakarta yaitu (Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025), (Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015), dan (Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026). Metode analisis yang dilakukan menggunakan telaah dokumen yaitu dokumen tidak hanya dibaca tetapi peneliti dapat melakukan interpretasi dan metode ini digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai

suatu peristiwa, tetapi mengalami kesulitan untuk mewawancarainya langsung. Selanjutnya, dari data pada ketiga dokumen tersebut diuraikan poin-poin yang berkaitan dengan konsep rencana pembangunan yang dilaksanakan pada Kota Surakarta sehingga dapat diketahui rencana pembangunan Kota Surakarta.

Kedua, analisis kegiatan festival Kota Surakarta melalui kalender festival Kota Surakarta (Kalender event Kota Solo 2023) dan foto pelaksanaan kegiatan festival (Adi, 2010). Metode analisis yang dilakukan menggunakan audio visual yaitu media yang mengandung tidak hanya unsur suara, tetapi juga unsur gambar berupa fotografi, videografi, objek seni, *software* komputer dan film. Selanjutnya, dari data mengenai kegiatan-kegiatan festival yang dilakukan tersebut diuraikan poin-poin

mengenai penyelenggaraan festival-festival di Kota Surakarta tersebut sehingga dapat diketahui kesuksesan Kota Surakarta dalam membangun *branding* kota.

Ketiga, analisis *Collaborative Governance* pada pembangunan Kota Festival Surakarta berdasarkan dokumen penelitian (Yasmin, 2017) yang berjudul Festival di Kota Surakarta yang menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival di Kota Surakarta. Metode analisis yang digunakan adalah telaah dokumen yaitu dengan menguraikan berbagai kolaborasi yang terjadi dalam kegiatan festival di Kota Surakarta dari dokumen penelitian tersebut yang kemudian pada penelitian ini selanjutnya akan digambarkan dengan kerangka kerja integratif untuk tata kelola kolaboratif berdasarkan (Emerson dkk., 2012) yaitu dengan menjabarkannya satu persatu menggunakan kerangka kerja integratif tersebut sesuai dengan pelaksanaan kegiatan festival di Kota Surakarta disandingkan dengan pengertian poin-poin kerangka kerja integratif untuk tata kelola kolaboratif menurut (Emerson dkk., 2012). Sehingga, dapat diketahui model tata kelola dalam rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Kota Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rencana Pembangunan Kota Festival melalui Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Pertama, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025: (1) terdapat poin kondisi saat ini mengenai kebudayaan yang memberikan keterangan yaitu kesenian khas Kota Surakarta yang masih terus dilestarikan dan pada tahun 2004 masih tercatat ada 332 organisasi kesenian dengan 11.310 orang anggota dan 115 seniman. Selain organisasi kesenian itu, dalam rangka mengembangkan seni budaya di Kota Surakarta, banyak lembaga-lembaga terkemuka di bidang seni budaya wilayah ini, seperti Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) dan lain sebagainya. Dengan berbagai program dan kegiatan masing-masing lembaga ini telah berperan aktif dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya Kota Surakarta; (2) terdapat visi pembangunan jangka panjang untuk kurun waktu 2005-2025 yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera.

Kedua, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015: (1) pada bidang kebudayaan, disebutkan bahwa Kota Surakarta memiliki *brand image* sebagai Kota Budaya. Di Kota Surakarta kesenian juga sangat berkembang, ditandai banyaknya berbagai kelompok seni dan budaya. Keberagaman budaya di Kota Surakarta tersebut menjadi simbol jati diri komunitasnya yang perlu dikembangkan dan dilakukan reaktualisasi agar mampu menjawab tantangan jaman, dengan tetap mengakar pada karakteristik daerah. Pelestarian dan pengembangan budaya di Kota Surakarta dilakukan melalui penyelenggaraan *event-event* budaya dan pariwisata. Melalui berbagai *event* tersebut diharapkan potensi wisata, seni dan budaya dapat dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri; (2) pada aspek daya saing daerah, terdapat keterangan memiliki *city brand* yang kuat sebagai kota budaya, kota batik, MICE dan *best destination* (daerah tujuan wisata); (3) visi Kota Surakarta selama kurun waktu 2010-2015 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kota dilandasi *spirit solo* sebagai kota budaya.

Ketiga, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026: (1) pada aspek pelayanan umum, upaya pembangunan di bidang kebudayaan selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat; (2) Pada permasalahan pertumbuhan dan daya saing ekonomi kota, pariwisata akan menjadi fokus pembangunan sebagai pendukung pemasaran Surakarta sebagai Kota Budaya; (3) Pada pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya, fungsi nilai budaya dalam pembangunan Kota Surakarta tidak hanya sebagai komoditas industri, namun lebih dari itu sebagai roh yang menggerakkan kehidupan. Tugas dinas pengampu urusan kebudayaan adalah sebagai agen penyebar virus nilai-nilai budaya *adiluhung* kepada seluruh komponen masyarakat kota, bahkan ke tingkat nasional hingga internasional; (4) Terdapat visi jangka menengah periode 2021-2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. (5) Pada poin Surakarta sebagai Kota Budaya yang modern, Surakarta sebagai Kota Budaya dari sisi nilai instrumental berarti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni, adat istiadat

budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya.

Dari ketiga dokumen pembangunan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan budayanya yang sangat banyak dan kental maka Kota Surakarta berusaha untuk dapat melakukan *branding* kota sebagai Kota Budaya dengan memunculkan kata budaya tersebut di hampir seluruh penjelasan perencanaan pembangunannya, terutama pada visinya. Kota Surakarta membuat pariwisata akan menjadi fokus pembangunan sebagai pendukung pemasaran Surakarta sebagai Kota Budaya. Sehingga sesuai dengan teori *city branding* yaitu melakukan pemasaran kota dengan rencana pembangunan sebagai kota festival dan dengan festival utamanya yaitu tentang budaya. Pemasaran kota dilakukan dengan berbagai macam *event* atau kegiatan festival budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta dengan bantuan dari ratusan organisasi dan lembaga kesenian yang ada di Kota Surakarta.

Analisis Kegiatan Festival Kota Surakarta melalui Kalender Festival dan Foto Pelaksanaan Kegiatan Festival

Kegiatan budaya di Kota Surakarta telah dilakukan secara turun temurun sejak lama di Kota Surakarta. Namun, kegiatan budaya yang diwujudkan dalam rencana pembangunan melalui kegiatan festival yang direncanakan dan dibuat kalender festivalnya adalah sejak tahun 2010 ditandai dengan masuknya agenda *event* budaya pada RPJMD Kota Surakarta tahun 2010-2015. Namun, tahun 2005 merupakan tahapan paling awal dalam terselenggaranya kegiatan festival yaitu festival bonraja dengan inisiasi sesuai *branding* kota budaya yang baru muncul pada RPJPD 2005-2025. Meskipun pada tahun-tahun tersebut kegiatan festival masih membutuhkan upaya yang besar dan mulai berhasil dengan baik pada tahun 2010.

Berdasarkan kalender festival Kota Surakarta tahun 2010 (Cholik, 2010), terdapat 35 agenda kegiatan budaya pada tahun 2010 yang diantaranya adalah Grebeg Sudiro, Solo Karnaval, Sekaten, Grebeg Mulud, Mahesa Lawung, Solo Menari, Seni Kampung Solo, Solo Batik Carnival, Mangkunegaran Performing Art, Keraton Art Festival, Solo International Performing Art (SIPA), Solo Keroncong Festival, Solo International Ethnic Music dan masih banyak kegiatan budaya lainnya.



Gambar 2.
Solo Batik Karnival 2010
Sumber: (Adi, 2010)

Karena kesuksesannya, maka setiap tahun diselenggarakan kegiatan-kegiatan festival budaya tersebut, dengan penambahan inovasi kegiatan festival baru setiap tahunnya yang digagas oleh tokoh-tokoh terkenal dari organisasi-organisasi kesenian di Kota Surakarta. Inovasi kegiatan festival modern juga ditambahkan dalam kegiatan-kegiatan festival yang dilaksanakan di Kota Surakarta seperti kegiatan festival musik jazz, kegiatan festival olahraga dan lain sebagainya.

Terdapat 47 kegiatan festival yang sudah dan akan diselenggarakan di Kota Surakarta (Kalender *event* Kota Solo

2023) yang terbagi kedalam *event* utama, dan *supporting event*. *Event* utama terdiri dari Kirab Malam 1 Suro, Solo Keroncong Festival, SIPA (Solo International Performing Art), dan sebagainya. *Supporting Event* terdiri dari Festival Hadrah, HATEDU (Hari Teater Dunia ke-10), Kampung Ramadhan, *Ramadhan Light Festival*, Festival Reog, Festival Wayang Bocah, Solo Batik Carnival (SBC), Solo City Jazz, Peringatan Hari Keris Dunia, Peringatan Hari Wayang Dunia, Solo Batik Fashion (SBF) dan lain sebagainya. Rincian kegiatan festival Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar 3 dibawah.



Gambar 3.
Kalender Festival Kota Surakarta 2023
Sumber: (Kalender event Kota Solo 2023)

Dari kegiatan-kegiatan festival tersebut diketahui bahwa Kota Surakarta telah sukses membangun *branding* kota sebagai Kota Festival dengan kekhususan festival yaitu terletak pada kegiatan budayanya. Kegiatan-kegiatan festival ini sangat berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat Kota Surakarta yang timbul dari *multiplier effect* kegiatan festival yang dilaksanakan. Kemudian kegiatan festival juga berdampak pada sosial masyarakat dimana nilai-nilai budaya yang menjadi dasar perilaku masyarakat dipegang teguh masyarakat Kota Surakarta serta kegiatan festival tersebut menjadi sarana bagi masyarakat kota Surakarta untuk bersosialisasi dan merasakan perasaan senang saat mengikuti kegiatan festival. Terakhir, kegiatan festival juga sangat berdampak pada budaya masyarakat Kota Surakarta yaitu semakin banyak masyarakat yang mau ikut serta dan berperan dalam pelestarian budaya yang merupakan tema utama dari kegiatan festival di Kota Surakarta.

Analisis Collaborative Governance pada Pembangunan Kota Festival Surakarta

Berdasarkan dokumen penelitian (Yasmin, 2017) mengenai pelaksanaan kegiatan festival-festival di Kota

Surakarta, dapat diuraikan berbagai kolaborasi yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan festival di Kota Surakarta yang nantinya pada penelitian ini akan digambarkan menggunakan kerangka kerja *collaborative governance*.

Berbagai kolaborasi yang dijelaskan pada penelitian tersebut kemudian diuraikan sebagai berikut: (1) Terselenggaranya berbagai festival yang diadakan di Kota Surakarta merupakan kolaborasi dari berbagai pihak di Kota Surakarta. Beberapa festival di Kota Surakarta merupakan festival yang berasal dari kampung dengan menunjukkan sumber daya berupa sejarah, keunikan, kuliner, kesenian, dan lain sebagainya. Sementara beberapa festival lainnya merupakan inisiasi dari pemerintah kota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berbagai organisasi kesenian yang ada di Kota Surakarta, dan lain sebagainya; (2) Pada pelaksanaan festival yang diinisiasi di tingkat kampung atau kelurahan di Kota Surakarta, pihak-pihak yang terlibat biasanya berasal dari kelurahan, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), Pokdarwis Kelurahan (Kelompok Sadar Wisata), Kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan lain sebagainya. Dengan rincian peran pada saat

penyelenggaraannya yaitu pihak kelurahan berkoordinasi dengan LPMK dalam menentukan berbagai hal yang dibutuhkan dalam kegiatan festival kampung. Dalam koordinasi tersebut, hal yang menjadi pembahasannya adalah susunan kepanitiaan, tugas panitia, dan sumber anggaran dana. Setelah koordinasi dalam bentuk musyawarah selesai dilaksanakan, hal-hal yang disepakati dimasukkan kedalam surat keputusan yang ditetapkan oleh lurah, yang disampaikan kepada beberapa pihak yaitu Walikota Surakarta, Ketua DPRD Kota Surakarta, Camat dari lingkup kelurahan yang mengadakan, dan Ketua LPMK; (3) LPMK merupakan salah satu lembaga berbadan hukum yang berada disetiap kelurahan yang tugasnya mengawasi kerja lurah mirip seperti tugas DPRD namun berada pada lingkup kelurahan. Setiap kelurahan memiliki Dana Pembangunan Kelurahan yang berasal dari pemerintah pusat. Dana tersebut hanya bisa diberikan melalui lembaga di masyarakat yang berbadan hukum yang salah satunya adalah LPMK. Dana tersebut digunakan untuk berbagai rencana pembangunan desa. Beberapa kampung yang setiap tahunnya sudah rutin melaksanakan festival budaya mengganggu Dana Pembangunan Kelurahan untuk agenda tersebut; (4) Pada pelaksanaan festival di

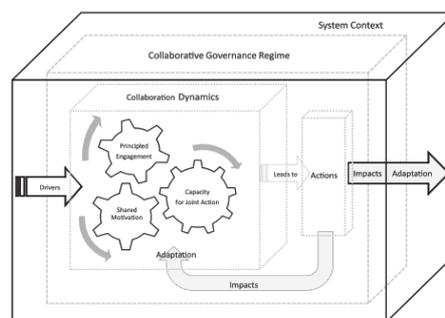
tingkat kota termasuk di beberapa kampung, diinisiasi oleh Pokdarwis. Pokdarwis terdapat ditingkat Kota dan Kelurahan. Kebijakan mengenai Festival Kota Solo oleh pemerintah kota juga salah satunya merupakan saran yang berasal dari Pokdarwis. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) merupakan kelompok swadaya masyarakat yang memiliki kepengurusan dan memiliki tugas yaitu menggali, membina dan mengembangkan berbagai potensi sumber daya wisata, serta kekhasan/keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsur kenangan setempat dan mempromosikannya; (5) Festival di Surakarta sebagian besar tumbuh dari organisasi-organisasi kesenian yang berada di Kota Surakarta yang memiliki ide, merencanakan, dan menyelenggarakan festival, dan kemudian pada penyelenggaraannya dibantu oleh pemerintah kota yang kemudian dijadikan agenda kota. Festival yang diinisiasi oleh pemerintah kota hanya akan terselenggara ketika ada perencanaan anggaran dan program kerja. Namun berbeda dengan yang diinisiasi oleh organisasi, festival akan memiliki nafas panjang yang berkelanjutan, karena komunitas/organisasi akan selalu berpikir secara terus-menerus untuk tetap melestarikan budaya yang dibawa pada saat festival

diselenggarakan; (6) Pelaksanaan festival di Kota Surakarta dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan, untuk Koordinator pelaksanaan festival biasanya merupakan budayawan Kota Surakarta. Terselenggarakannya kegiatan festival dengan baik merupakan kolaborasi dari berbagai elemen dari masyarakat yaitu seniman, budayawan, akademisi, dan Kelompok Sadar Wisata yang dalam hal ini mengkoordinir masyarakat dari setiap kelurahan. Kegiatan festival juga didukung oleh beberapa lembaga seperti Salopos, Solo Radio, Mataya Art & Heritage, Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara, dan lain sebagainya.

Dari uraian kolaborasi yang dijelaskan pada penelitian sebelumnya tersebut, kemudian selanjutnya akan digambarkan melalui kerangka kerja integratif untuk tata kelola kolaboratif berdasarkan (Emerson dkk., 2012).

Menurut (Emerson dkk., 2012) Kerangka kerja integratif untuk tata kelola kolaboratif digambarkan dalam Gambar 4 sebagai tiga dimensi bersarang, ditampilkan sebagai kotak, mewakili konteks sistem umum, rezim tata kelola kolaboratif (CGR), dan dinamika dan tindakan kolaboratifnya. Kotak terluar, yang digambarkan dengan garis padat, merepresentasikan konteks sistem di sekitarnya atau kumpulan pengaruh politik, hukum, sosial ekonomi, lingkungan dan lainnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh CGR. Konteks sistem ini menghasilkan peluang dan kendala serta memengaruhi dinamika kolaborasi di awal dan seiring waktu. Dari konteks sistem ini muncul penggerak, termasuk kepemimpinan, insentif konsekuensial, saling ketergantungan, dan ketidakpastian, yang membantu memulai dan menetapkan arah untuk CGR.

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>



Gambar 4.
Kerangka Kerja Integratif untuk Tata Kelola Kolaboratif
Sumber: (Emerson dkk., 2012)

Uraian *Collaborative Governance* yang dapat digambarkan pada Kota Surakarta sebagai Kota Festival disandingkan dengan pengertian poin-poin kerangka kerja integratif untuk tata kelola kolaboratif menurut Emerson dkk., (2012), diantaranya sebagai berikut:

Konteks Sistem

Menurut (Emerson dkk., 2012), konteks sistem direpresentasikan dalam kerangka ini, bukan sebagai rangkaian kondisi awal tetapi sebagai ruang tiga dimensi yang melingkupinya karena kondisi eksternal (misalnya pemilihan umum, kemerosotan ekonomi, peristiwa cuaca ekstrem, atau peraturan yang baru diberlakukan) dapat mempengaruhi dinamika dan kinerja kolaborasi tidak hanya di awal tetapi setiap saat selama hidup CGR, sehingga membuka kemungkinan baru atau menghadirkan tantangan yang tidak terduga.

Konteks sistem pada Kota Surakarta sebagai Kota Festival adalah *city branding* yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025, Perda Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2010-2015, dan Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun

2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai ruang tiga dimensi yang melingkupinya karena dokumen rencana pembangunan tersebut dapat memengaruhi dinamika dan kinerja kolaborasi, tidak hanya di awal tetapi setiap saat selama hidup CGR.

Penggerak

Menurut (Emerson dkk., 2012), penggerak ini termasuk kepemimpinan (kehadiran seorang pemimpin yang teridentifikasi berada dalam posisi untuk memprakarsai dan membantu mengamankan sumber daya dan dukungan untuk CGR), insentif konsekuensial (mengacu pada pendorong internal misalnya masalah, kebutuhan sumber daya, kepentingan, atau peluang, serta mengacu pada pendorong eksternal misalnya krisis, ancaman atau peluang), saling ketergantungan (ketika individu dan organisasi tidak mampu mencapai sesuatu sendiri), dan ketidakpastian (bagaimana mengelola masalah sosial dengan berkolaborasi guna mengurangi, menyebarkan dan berbagi resiko).

Penggerak pada Kota Surakarta sebagai Kota Festival adalah kepemimpinan (terpilihnya Ir. Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta pada tahun 2005 yang membuat inisiasi tentang *city branding* Kota Surakarta

sebagai Kota Budaya dengan mengajak masyarakat terutama penggiat organisasi kesenian yang ada di Surakarta untuk melakukan berbagai festival dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki kota), insentif konsekuensial (kepentingan dan peluang yang sama yang dimiliki oleh berbagai pihak yaitu keinginan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari bidang pariwisata dengan memanfaatkan potensi budaya yang dimiliki yang sejalan dengan pelestarian budaya yang diinginkan oleh seluruh masyarakat), saling ketergantungan (festival tidak akan terlaksana dengan baik jika hanya dilakukan oleh pemerintah kota saja ataupun dari masyarakat saja sehingga kegiatan festival itu dapat berhasil sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai pihak di Surakarta yaitu pemerintah kota, seniman, budayawan, media masa, perusahaan, sponsor, organisas-organisasi kesenian, akademisi, pokdarwis, PKK, dan lain sebagainya sampai ke masyarakat), dan ketidakpastian (resiko ketidakterlaksanaan festival dengan baik yang dipikirkan dan ditanggung bersama oleh seluruh pihak).

Rezim Tata Kelola Kolaboratif

Menurut Emerson dkk., (2012), Regim Tata Kelola Kolaboratif yaitu sistem dimana kolaborasi lintas batas mewakili dominasi untuk perilaku, pengambilan keputusan, dan aktivitas.

Regim Tata Kelola Kolaboratif pada Kota Surakarta sebagai Kota Festival yaitu sistem pelaksanaan perencanaan pembangunan kota surakarta sebagai kota festival dengan kekhususan tema yaitu budaya dimana kolaborasi lintas batas mewakili dominasi untuk perilaku, pengambilan keputusan, dan aktivitas pada kegiatan-kegiatan festival yang dilakukan.

Dinamika Kolaboratif

Menurut (Emerson dkk., 2012), terdapat tahapan dalam dinamika kolaboratif sebagai interaksi siklus atau iteratif yang terdiri dari tiga komponen yaitu keterlibatan prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk tindakan bersama.

Dinamika Kolaboratif pada Kota Surakarta sebagai Kota Festival yaitu terdapat tahapan dalam dinamika kolaboratif sebagai interaksi siklus atau iteratif yang terdiri dari tiga komponen yaitu keterlibatan prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk tindakan

bersama yang akan dijelaskan dalam poin selanjutnya.

Keterlibatan Prinsip

Menurut Emerson dkk., (2012), melalui keterlibatan berprinsip, orang-orang dengan konten, relasional, dan tujuan identitas yang berbeda bekerja melintasi batas-batas kelembagaan, sektoral, atau yurisdiksi masing-masing untuk memecahkan masalah, menyelesaikan konflik, atau menciptakan nilai. Keterlibatan prinsip terjadi dari waktu ke waktu melalui iterasi dari empat elemen proses dasar yaitu penemuan (pengungkapan minat, perhatian, nilai individu dan bersama, dan identifikasi dan analisis informasi yang relevan dan signifikan serta implikasinya), definisi (upaya berkelanjutan untuk membangun makna bersama dengan mengartikulasikan tujuan dan sasaran bersama; menyepakati konsep dan terminologi yang akan digunakan peserta untuk menjelaskan dan mendiskusikan masalah dan peluang; mengklarifikasi dan menyesuaikan tugas dan harapan satu sama lain; dan menetapkan kriteria bersama untuk menilai informasi dan alternatif), pertimbangan (komunikasi yang jujur dan beralasan, secara luas dirayakan sebagai ciri khas dan unsur penting dari keterlibatan yang sukses.

Kualitas musyawarah, terutama ketika peserta memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda, bergantung pada advokasi yang terampil dari individu dan kepentingan yang diwakili serta efektivitas strategi dan intervensi resolusi konflik, musyawarah bukanlah “agregasi kepentingan”. Ini membutuhkan pemeriksaan masalah yang bijaksana, mendengarkan perspektif orang lain, dan sampai pada penilaian publik tentang apa yang mewakili kebaikan bersama, dan tekad/penentuan (menggabungkan proses pembuatan penentuan bersama yang dapat dihitung, termasuk keputusan prosedural misalnya, menetapkan agenda, mengajukan diskusi, menugaskan kelompok kerja dan penentuan substantif misalnya, mencapai kesepakatan tentang item tindakan atau rekomendasi akhir).

Keterlibatan prinsip pada Kota Surakarta sebagai Kota Festival yaitu berbagai pihak dari berbagai macam sektor terlibat dan berkolaborasi dalam festival Kota Surakarta dengan satu prinsip yang sama yaitu ingin memajukan pariwisata kota yang sejalan dengan melestarikan budaya yang dimiliki Kota. Keterlibatan prinsip terjadi dari waktu ke waktu melalui iterasi dari empat elemen proses dasar yaitu penemuan (memiliki perhatian

yang sama terhadap terselenggaranya festival dengan baik), definisi (upaya berkelanjutan untuk dapat menyelenggarakan festival dengan sangat baik, dimulai dari penemuan ide tema festival, pembentukan kepanitiaan, melakukan pembagian tugas, dan menyepakati pelaksanaan festival), pertimbangan (pelaksanaan festival dilakukan dengan koordinasi yang dilakukan oleh seluruh aktor dari berbagai sektor yang terlibat yang dilakukan dengan musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para pihak), dan penentuan (menggabungkan pembuatan festival bersama, termasuk keputusan proseduralnya yaitu, menetapkan agenda, mengajukan diskusi, menugaskan kelompok kerja dan penentuan substantif misalnya, mencapai kesepakatan tentang item tindakan atau rekomendasi akhir dalam melaksanakan festival).

Motivasi Bersama

Menurut Emerson dkk., (2012), motivasi bersama yaitu siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen yaitu saling percaya (pengembangan kepercayaan yang terjadi seiring berjalannya waktu ketika para pihak bekerjasama, mengenal satu sama lain, dan membuktikan satu sama lain bahwa mereka masuk akal, dapat diprediksi,

dan dapat diandalkan), saling mengerti (kepercayaan membentuk dasar saling pengertian dengan memungkinkan orang untuk melihat dan kemudian menghargai perbedaan orang lain, saling pengertian secara khusus mengacu pada kemampuan untuk memahami dan menghormati posisi dan kepentingan orang lain bahkan ketika seseorang mungkin tidak setuju), legitimasi internal (penegasan bahwa peserta dalam upaya kolektif dapat dipercaya dan kredibel, dengan kepentingan yang kompatibel dan saling bergantung, melegitimasi dan memotivasi kolaborasi yang berkelanjutan), dan komitmen (yang memungkinkan peserta melintasi batas-batas organisasi, sektoral, dan/atau yurisdiksi yang sebelumnya memisahkan mereka dan berkomitmen pada jalur bersama).

Motivasi bersama pada Kota Surakarta sebagai Kota Festival yaitu siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen yaitu saling percaya (festival didasari oleh rasa saling percaya dari berbagai aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah kota, swasta, sponsor, media masa, budayawan, organisasi-organisasi seni, akademisi, LPMK, Pokdarwis, dan sebagainya termasuk masyarakat dengan mempercayakan peran dan tugasnya masing-masing terhadap keberlangsungan pelaksanaan

festival), saling mengerti (saling menghargai dan menghormati perannya masing-masing dari berbagai aktor yang terlibat dalam festival), legitimasi internal (penegasan bahwa berbagai aktor yang terlibat dalam upaya kolektif yaitu festival dapat dipercaya dan kredibel sehingga berbagai pelaksanaan festival dapat berjalan dengan baik dari tahun ke tahun yang sejalan dengan terus bertambahnya inovasi festival yang dilaksanakan), dan komitmen (seluruh aktor yang terlibat benar-benar memiliki komitmen yang tinggi terhadap festival yang dilaksanakan sehingga kegiatanpun berjalan dengan baik tanpa adanya satu aktorpun yang memutuskan untuk tidak terlibat, semua ini karena seluruh aktor mempunyai nilai budaya dan sosial yang sama yang sebagian besar merupakan masyarakat asli Kota Surakarta yang sangat berpegang teguh pada budaya).

Kapasitas untuk Aksi

Menurut Emerson dkk., (2012), kapasitas untuk aksi yaitu kumpulan elemen lintas fungsional yang bersatu untuk menciptakan potensi untuk mengambil tindakan efektif dan melayani sebagai penghubung antara strategi dan kinerja. Kapasitas untuk aksi bersama dikonseptualisasikan sebagai kombinasi dari empat elemen penting yaitu pengaturan prosedural dan

kelembagaan (mencakup berbagai protokol proses dan struktur organisasi yang diperlukan untuk mengelola interaksi berulang dari waktu ke waktu), kepemimpinan (termasuk peran kepemimpinan antara lain sebagai sponsor, penyelenggara, fasilitator/ mediator, perwakilan organisasi atau konstituen, penerjemah sains, teknolog, dan advokat publik. Peran kepemimpinan tertentu sangat penting di awal, yang lain lebih kritis pada saat-saat musyawarah atau konflik, dan yang lain lagi dalam memperjuangkan penentuan kolaboratif hingga implementasi), pengetahuan (modal sosial dari pengetahuan bersama yang telah ditimbang, diproses, dan diintegrasikan dengan nilai dan penilaian semua peserta), dan sumber daya (sumber daya yang berguna dapat mencakup pendanaan, waktu, dukungan teknis dan logistik; bantuan administrasi dan organisasi, keterampilan yang diperlukan untuk analisis atau implementasi, dan kekuasaan, segala sumber daya ini harus dimanfaatkan bersama untuk tujuan bersama).

Kapasitas untuk aksi pada Kota Surakarta sebagai Kota Festival yaitu berbagai aktor terlibat dalam festival di Kota Surakarta yang berasal dari berbagai sektor yang bersatu untuk melaksanakan festival Kota Surakarta.

Kapasitas untuk aksi bersama dikonseptualisasikan sebagai kombinasi dari empat elemen penting yaitu pengaturan prosedural dan kelembagaan (dengan membuat susunan kepanitaan dan pembian tugas yang jelas antar berbagai aktor yang terlibat termasuk peran masyarakat), kepemimpinan (peran dari walikota sebagai pemimpin daerah, peran dari dinas kebudayaan dan pariwisata, peran dari berbagai perusahaan sebagai sponsor yang terlibat dan membantu menyukseskan kegiatan dengan bantuan dananya peran dari panitia penyelenggara, peran dari fasilitator/mediator yang dalam hal ini sering kali dilakukan oleh Pokdarwis, peran dari berbagai perwakilan organisasi seni, peran dari budayawan dan akademisi. Peran kepemimpinan diawal yang sangat menentukan adalah peran dari walikota yang sangat menentukan jalannya kegiatan festival agar dapat diselelenggarakan, kemudian peran dari berbagai organisasi seni dan budayawan serta akademisi yang sangat dibutuhkan dalam memberikan pendapatnya pada saat musyawarah pelaksanaan festival, dan peran yang lainnya adalah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pembagian tugas termasuk peran para sponsor dan masyarakat), pengetahuan (semua peserta bermusyawarah untuk

berbagi pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing untuk dapat berguna dan berperan dalam kegiatan festival), dan sumber daya (mencakup pendanaan dari pemerintah dan sponsor, waktu yang disediakan oleh berbagai aktor serta yang dibutuhkan untuk persiapan kegiatan festival sampai implementasi, dukungan teknis dan logistik dari berbagai pihak termasuk pemerintah kota, pihak sponsor, media masa, atau para penggiat seni dan budayanya; dan sumber daya lainnya yang dimanfaatkan bersama untuk tujuan terselenggaranya berbagai festival dengan baik).

Tindakan Kolaboratif

Menurut Emerson dkk., (2012), CGR yang efektif harus menyediakan mekanisme baru untuk tindakan kolektif yang ditentukan oleh mitra kolaborasi sesuai dengan teori tindakan tersurat atau tersirat mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bergantung pada konteks dan muatan CGR, tindakan tersebut dapat mencakup, misalnya, mendapatkan dukungan, mendidik konstituen atau publik, memberlakukan langkah kebijakan (Undang-Undang atau peraturan baru), mengatur sumber daya eksternal, mengerahkan staf, menempatkan dan mengizinkan fasilitas, membangun atau membersihkan,

menjalankan praktik manajemen baru, memantau implementasi, dan menegakkan kepatuhan.

Tindakan kolaboratif pada Kota Surakarta sebagai Kota Festival yaitu berbagai aktor dari berbagai sektor berkolaborasi untuk mengadakan berbagai festival dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh Kota Surakarta untuk meningkatkan pariwisata yang sejalan dengan pelestarian budaya berdasarkan hasil koordinasi bersama. Dengan langkah kebijakan pembangunan yaitu Kota Festival Surakarta untuk tujuan ekonomi, sosial, dan budaya.

Dampak

Menurut Emerson dkk., (2012), dampak dihasilkan dari tindakan yang didorong oleh dinamika kolaboratif. Dampak adalah perubahan keadaan yang disengaja (dan tidak disengaja) dalam konteks sistem; mereka adalah perubahan dalam kondisi yang sudah ada sebelumnya atau yang diproyeksikan yang dianggap tidak diinginkan atau membutuhkan perubahan. Dampak juga dapat mencakup nilai tambah dari barang sosial baru atau inovasi teknologi yang dikembangkan melalui tindakan kolaboratif. Dampak dapat bersifat fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan/atau politik. Mereka bisa spesifik, diskrit, dan

jangka pendek atau bisa lebih luas, bersifat kumulatif, dan dengan dampak jangka panjang.

Dampak pada Kota Surakarta sebagai Kota Festival yaitu dihasilkan dari tindakan yang didorong oleh pembangunan kota yaitu dampak terhadap peningkatan ekonomi kota surakarta melalui berbagai *multiflier effect* yang ditimbulkan yaitu dampak terhadap sosial masyarakat melalui berbagai festival sebagai sarana masyarakat untuk bersosialisasi dan merasakan senang saat mengikuti festival, serta dampak terhadap pelestarian dan keberlanjutan budaya, terkait dengan beberapa festival yang dilaksanakan di beberapa ruang publik seperti taman, jalan raya dan lain sebagainya maka dampak dapat terjadi terhadap beberapa ruang perkotaan tersebut secara sementara selama kegiatan festival dilaksanakan saja misal terjadinya kemacetan atau kerumunan atau bisa saja terjadinya sampah.

Adaptasi

Menurut Emerson dkk., (2012), jika aksi bersama awal tidak terjadi atau dampaknya tidak dekat dengan target yang teridentifikasi, CGR akan ditekan oleh mitranya untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan pada targetnya, teori aksinya, dinamika

kolaboratifnya, atau investasinya dalam membangun lebih banyak kapasitas untuk aksi bersama.

Adaptasi pada Kota Surakarta sebagai Kota Festival yaitu sekitar tahun 2005 yang merupakan tahun-tahun awal dilaksanakan nya festival, festival yang diadakan kurang tersosialisasi dan terpublikasi dengan baik sehingga kurangnya minat wisatawan dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sehingga dilakukan evaluasi secara terus menerus dan perbaikan terhadap proses sosialisasi dan publikasi, sampai akhirnya pada tahun 2010 pemerintah kota melalui dinas kebudayaan dan pariwisata mulai melakukan publikasi melalui berbagai macam *platform* yaitu *Facebook*, *Twitter*, *Website*, dan *Instagram* Pemerintah Kota Surakarta, serta membuat kalender festival sebagai iklan.

KESIMPULAN

Dari berbagai analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka didapat temuan bahwa Kota Surakarta melakukan perencanaan pembangunan melalui *city branding* sebagai Kota Festival dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki kota yang potensi paling besar yang dimilikinya yaitu budaya. Berbagai kegiatan festival mulai

dilaksanakan sejak tahun 2005 yang merupakan tahun-tahun awal kegiatan festival sehingga masih sangat banyak kekurangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, inovasi kegiatan festival semakin meningkat sampai akhirnya pada tahun 2010 Pemerintah Kota Surakarta mulai berhasil menyelenggarakan berbagai festival setiap tahunnya dengan sangat baik dan dengan jumlah festival dalam satu tahun yang sudah cukup banyak yang ditandai dengan mulai dibuatnya kalender festival dan melakukan sosialisasi dan publikasi di berbagai *platform* media sosial termasuk *website* yang dimiliki oleh pemerintah kota. Keberhasilan penyelenggaraan berbagai festival yang dilaksanakan sebagai bagian dari *branding* Kota Surakarta sebagai kota festival adalah berkat dari berbagai aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan festival. **Kebaruan** dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa *Collaborative Governance* dapat dijelaskan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan festival yang dilaksanakan oleh Kota Surakarta dalam menciptakan *branding* sebagai Kota Festival sesuai dengan dokumen rencana pembangunannya.

Kerangka kerja integratif untuk tata kelola yang kolaboratif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Emerson dkk., (2012). Dapat

dijelaskan bahwa *Collaborative Governance* sesuai dengan pengertian menurut Emerson dkk., (2012) yang diuraikan dari *Collaborative Governance* yang terjadi di Kota Festival Surakarta yaitu merupakan suatu proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang dalam hal ini dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah Kota Surakarta yang melibatkan orang-orang secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau ruang publik, swasta dan masyarakat Kota Surakarta untuk melaksanakan tujuan publik yaitu menciptakan *branding* Kota Surakarta sebagai Kota Festival.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan *Collaborative Governance* merupakan tata kelola yang dilakukan di Kota Surakarta dalam perencanaan pembangunan kotanya. *Collaborative Governance* dianggap baik untuk dilakukan, terbukti dengan terselenggaranya berbagai kegiatan festival di Kota Surakarta yang sejalan dengan terus bertambahnya inovasi berbagai festival yang dilaksanakan. Kegiatan festival yang dilaksanakan berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat, serta pelestarian budaya yang sangat dipegang teguh oleh seluruh

masyarakat Kota Surakarta.

Penelitian ini memberikan **kontribusi** dalam menjelaskan bagaimana *collaborative governance* dapat dilakukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan kota sehingga rekomendasi dari penelitian ini adalah kota-kota lain dapat menerapkan rencana pembangunan dengan model *Collaborative Governance* sesuai yang dilaksanakan di Kota Surakarta. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, maka semakin banyak rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih banyak disampaikan dari penulis untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- Adi, G. N. (2010). *Solo Batik Carnival*. <https://solografi.wordpress.com/2010/06/25/semarak-solo-batik-carnival/>.
- Ahn, M., & Emerson, K. (2022). *Collaborative Governance Regimes Informing Practice through Research*. Washington, D.C: Brookings Institution Press. <https://www.researchgate.net/publication/359971948>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp. 543–571.

- <https://doi.org/10.1093/jopart/mu032>
- Anttiroiko, A.-V. (2014). *The Political Economy of City Branding*. New York: Routledge.
- Cholik, A. (2010). *Cultural Event Calendar of Solo 2010*. <https://beautyfullindonesia.blogspot.com/>.
- de Jong, M., dkk. (2018). Explaining City Branding Practices in China's Three Mega-City Regions: The Role of Ecological Modernization. *Journal of Cleaner Production*, 179, pp. 527–543. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.098>
- Dey, I. (1993). *Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists*. New York: Routledge.
- Dinnie, K. (2011). *Introduction to the Theory of City Branding*. London: Palgrave Macmillan.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), pp. 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Gilboa, S., Jaffe, E. D., Vianelli, D., Pastore, A., & Herstein, R. (2015). A Summated Rating Scale for Measuring City Image. *Cities*, 44, pp. 50–59. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.01.002>
- Gold, J. R., & Gold, M. M. (2020). *Festival Cities: Culture, Planing, and Urban Life*. New York: Routledge.
- Johansson, M. (2020). *City Festivals and Festival Cities*. Dalam *The Cambridge Companion to International Theatre Festivals* (pp. 54–69). Cambridge: Cambridge University Press.
- <https://doi.org/10.1017/9781108348447.004>
- Kalender *Event* Kota Solo 2023. (t.t.). <https://pariwisatasolo.surakarta.go.id>. Diambil 21 Agustus 2023, dari <https://pariwisatasolo.surakarta.go.id/destinations/kalender-event-solo-2023/>
- Martínez Sánchez, M. J., Frost, C., & Xiao, J. (2018). Architecture, Festival and The City: Introduction. *Architecture and Culture*, 6(3), pp. 361–370. <https://doi.org/10.1080/20507828.2018.1535013>
- pariwisatasolo.surakarta.go.id. (t.t.). *Budaya Intangible Kota Surakarta*. <https://pariwisatasolo.surakarta.go.id/destination-category/intangible/>.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.
- Pirmanto, D., Labib Jundillah, M., & Aprian Widagdo, K. (2016). Jenis Penelitian Menurut Kedalaman Analisis Data. *Journal of the American Chemical Society*, 77(21).
- Primasasti, A. (2022). *Budaya Solo menjadi Warisan Budaya Dunia*. <https://surakarta.go.id/?p=23362>.
- Purdy, J. M. (2012). A Framework for Assessing Power in Collaborative Governance Process. *Public*

- Administration Review*, 72(3), pp. 409–417.
- Richards, G., & Leal Londoño, M. D. P. (2022). Festival Cities and Tourism: Challenges and Prospects. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 14(3). <https://doi.org/10.1080/19407963.2022.2087664>
- Smith, A., Osborn, G., & Quinn, B. (2022). *Festivals & The City: The Contested Geographies of Urban Events*. London: University of Westminster Press.
- Stolarick, K., Denstedt, M., Donald, B., & Spencer, G. M. (2010). Creativity, Tourism and Economic Development in a Rural Context: The Case of Prince Edward County. *Journal of Rural and Community Development*, 5(1/2), pp. 238–254. www.jrcd.ca
- Vanolo, A. (2018). Politicising City Branding: Some Comments on Andrea Lucarelli's 'Place Branding as Urban Policy.' *Cities*, 80, pp. 67–69. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.06.004>
- Yasmin, F. (2017). *Festival di Kota Surakarta* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta). Diperoleh dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/66348/>
- Zenker, S. (2018). Editorial: City Marketing and branding as Urban Policy. *Cities*, 80, pp. 1–3). <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.06.001>